

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan redaksi Majalah Tempo dan Historia.id dalam meliput peristiwa 1965 terbentuk oleh kombinasi dari nilai pribadi jurnalis, arah kebijakan media, serta dinamika ruang redaksi yang dibingkai melalui teori hierarki pengaruh. Kedua media relatif memiliki ruang redaksi yang independen dari intervensi pemilik modal atau tekanan politik, tetapi tetap memiliki perbedaan karakter dalam mengelola isu 1965.

Majalah Tempo menerapkan kebijakan yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap perkembangan isu politik. Liputan tentang peristiwa 1965 biasanya hadir saat momen komemorasi atau ketika ada dinamika politik yang relevan. Hal ini memperlihatkan bahwa rutinitas redaksional dan aktualitas menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan liputan. Sementara itu, Historia.id memosisikan isu 1965 sebagai bagian dari identitas medianya. Liputan dilakukan secara berkala, tak bergantung pada momentum politik, melainkan sebagai bagian dari misi membuka kembali narasi sejarah yang selama ini dikecualikan.

Perbedaan kebijakan ini berpengaruh pada bagaimana narasi dibentuk. Tempo lebih banyak menyorot dimensi politik dari peristiwa 1965, misalnya soal keterlibatan aktor negara atau pengaruh global. Sementara itu, Historia lebih menekankan pada narasi korban dan ingatan personal yang selama ini terpinggirkan. Dalam konteks ini, kerja media berfungsi sebagai proses ritual, yakni proses yang secara sadar mengorganisasi makna atas realitas sosial melalui praktik penyajian yang dipilih redaksi.

Keduanya juga menunjukkan bagaimana media dapat menjadi pengelola memori kolektif. Walaupun tidak semua informan secara langsung menyebut istilah ‘memori kolektif’, kesadaran akan peran media

dalam menyuarakan sejarah yang terpinggirkan tetap muncul, khususnya di Historia.id. Kesadaran ini terlihat dari bagaimana jurnalis memaknai akses mereka terhadap media sebagai ruang ekspresi. Bukan hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk memperjuangkan narasi sejarah yang mereka anggap penting. Hal ini sejalan dengan konsep memori media yang memungkinkan jurnalis untuk menggunakan media sebagai platform merawat ingatan kolektif

Dengan demikian, kebijakan redaksi bukan hanya memengaruhi isi liputan, tetapi juga menjadi bagian dari kerja simbolik media dalam mengatur cara masyarakat mengingat. Media tidak hanya menyampaikan ulang sejarah, tetapi juga memilih narasi mana yang layak dirawat dan diberi ruang. Di sinilah kebijakan redaksi menjadi penentu bagaimana memori kolektif tentang peristiwa 1965 dibentuk dan dikomunikasikan ke publik.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Akademis

Secara akademis, penelitian ini membuka ruang untuk eksplorasi lebih lanjut mengenai relasi antara praktik jurnalistik dan pembentukan memori kolektif di Indonesia. Penelitian selanjutnya dapat memperluas fokus pada media alternatif, komunitas, atau media digital baru yang juga memainkan peran dalam rekonstruksi sejarah. Selain itu, pendekatan komparatif terhadap media di berbagai rezim politik atau lintas negara juga dapat memperkaya pemahaman mengenai bagaimana memori kolektif dikonstruksi dalam sistem media yang berbeda. Dalam konteks metodologi, penelitian mendatang juga disarankan untuk melibatkan observasi lapangan saat proses pengumpulan data. Kehadiran langsung di ruang redaksi atau dalam aktivitas peliputan dapat memberikan wawasan etnografis yang lebih mendalam mengenai dinamika kerja jurnalis, interaksi antaraktor redaksional, serta pertimbangan praktis

yang mungkin tidak sepenuhnya terungkap dalam wawancara saja. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkaya dimensi analisis terhadap praktik editorial dan konstruksi narasi sejarah secara lebih kontekstual.

5.2.2 Saran Praktis

Bagi pelaku media, temuan dalam penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam menyusun kebijakan redaksi yang lebih reflektif dan kritis terhadap liputan isu-isu yang menyangkut pelanggaran HAM dan memori kolektif yang traumatis. Redaksi perlu menyadari bahwa narasi sejarah yang mereka hadirkan tidak hanya menjadi informasi masa lalu, tetapi juga membentuk orientasi publik terhadap masa kini dan masa depan.

Liputan mengenai peristiwa 1965, misalnya, sebaiknya tidak dikurung dalam momen komemorasi tahunan, melainkan hadir secara berkelanjutan dan kontekstual. Dengan demikian, media dapat memainkan perannya sebagai institusi demokratis yang berkontribusi dalam proses rekonsiliasi dan pembentukan identitas kolektif bangsa yang inklusif.

